



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL DJTJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MADIUN



Laporan Pengarusutamaan Gender



TAHUN 2023



Jalan Salak Nomor 52 Madiun
Telepon (0351) 454545
kppnmadiun@kemenkeu.go.id
<https://djp.b.kemenkeu.go.id/kppn/madiun/id/>

Kata Pengantar

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Laporan Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) KPPN Madiun Tahun 2023 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik

Tujuan umum pelaksanaan PUG Kementerian Keuangan adalah memastikan seluruh kebijakan, program dan kegiatan berlaku adil gender dan setara dalam mendapatkan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki. Sedangkan tujuan khususnya adalah memastikan bahwa seluruh jajaran Kementerian Keuangan memahami konsep, prinsip, dan strategi PUG dalam penyelenggaraan pembangunan yang menjadi tugas, fungsi dan kewenangan Kementerian Keuangan, serta memastikan pengarusutamaan gender terlembaga, lestari dan berkualitas dalam penyelenggarannya.

Sejalan dengan hal tersebut, KPPN Madiun sebagai unit instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, berkewajiban menjalankan amanat regulasi dalam mengimplementasikan tujuh prasyarat PUG terkait pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkesetaraan dan berkeadilan gender. Pelaksanaan PUG tidak hanya sebatas penyediaan sarana dan prasarana dan pelayanan, namun juga di tingkat kebijakan dan implementasi yang berdampak langsung dan tidak langsung kepada masyarakat dan kesejahteraan masyarakat baik laki-laki, perempuan, maupun kelompok rentan.



Semoga dengan layanan yang responsif gender, KPPN Madiun dapat mewujudkan kantor pelayanan publik yang berstandar dunia dan layanan responsif gender. Selamat berkarya, tetap semangat dan salam kesetaraan gender!

*Kepala KPPN Madiun,
Joko Maryono*

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Dasar Hukum	3
Tugas dan Fungsi	4
Prasyarat Implementasi PUG Gambar/Foto disertai dengan	5
a. Komitmen Pimpinan	5
b. Kebijakan yang Responsif Gender	6
c. Kelembagaan PUG	14
d. Sumber Daya Manusia dan Anggaran	18
e. Data Terpilah	19
f. Alat Analisis Gender	23
g. Kegiatan Partisipasi Masyarakat	24
Kesimpulan dan Rencana Kedepan	25
Lampiran	
RAB/TOR ARG (Anggaran Responsif Gender)	

DASAR HUKUM

1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK02/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 807/KMK.01/2018, tentang Pedoman Implementasi PUG di Lingkungan Kementerian Keuangan;
8. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 270/M.PPN/11/2012, Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4379A/SJ, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor SE-46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-116/PB/2017 Tentang Implementasi Pengarusutamaan Gender Di Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
10. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-4178/PB/2018 tanggal 6 Juni 2018 hal Standar Operasional Prosedur (SOP) Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Lingkup DJPb.

Pengarusutamaan Gender di KPPN Madiun

Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di KPPN Madiun adalah dalam rangka upaya melaksanakan amanat regulasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkesetaraan dan berkeadilan gender, sehingga diharapkan pegawai KPPN Madiun nantinya mampu memberikan layanan terbaik dalam akses, kesempatan dan manfaat atas kebijakan kepada mitra kerja dan pemangku kepentingan tanpa terkendala oleh kondisi kodratnya.

Ketidakadilan dan Diskriminasi Gender

1. *Stereotype* gender, misalnya petugas front perempuan, karena luwes dan lebih teliti.
2. Subordinasi gender, misal dalam kasus penugasan luar kota dan kesempatan sekolah, jika perempuan harus ijin suami, sedangkan jika suami yang ditugaskan ke luar kota atau sekolah tidak perlu ijin istri terlebih dahulu, karena kesempatan sekolah dan karir lebih utama laki-laki selaku pencari nafkah utama (kepala keluarga).
3. Beban ganda, yaitu mengurus rumah tangga dan keluarga seolah-olah tanggung jawab perempuan, sehingga perempuan terbatas waktu dalam menjalankan tugas kantor di luar jam kerja (lembur);
4. Sarana dan prasarana layanan belum optimal dalam mengakomodir responsif gender, misal untuk pegawai yang sakit, perempuan yang hamil atau menyusui belum tersedia sarana memenuhi kebutuhannya.

TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Madiun sebagai KPPN Tipe A1 memiliki tugas antara lain melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN) serta menatausahakan pengeluaran anggaran dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Guna melaksanakan tugas tersebut, KPPN Madiun menjalankan fungsi antara lain

- pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara;
- pengelolaan rencana penarikan dana; dan
- penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Seiring dengan upaya peningkatan peran instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah, dilakukan penajaman tugas dan fungsi KPPN melalui *Shadow Organization*. Dalam *Shadow Organization* sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-3/PB/2023 tanggal 4 Januari 2023 tentang Pembentukan *Shadow Organization* pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, KPPN perlu menguatkan fungsi dan perannya sebagai *Treasurer*, *Regional Chief Economist*, dan *Financial Advisor*.

Tugas-tugas yang dijalankan KPPN Madiun sebagai *Treasurer*, *Regional Chief Economist*, dan *Financial Advisor* antara lain adalah sebagai berikut:

1. melakukan pengelolaan organisasi, sumber daya manusia, kinerja, dan keuangan;
2. melakukan penyelesaian pengesahan Surat Perintah Membayar (SPM);
3. melakukan pengelolaan data kontrak dan data supplier;
4. melakukan monitoring pagu dan realisasi anggaran satuan kerja;
5. melakukan penerbitan SP2D, SP2B BLU, SPHL, dan SP3HL;
6. melakukan reviu laporan pertanggungjawaban bendahara;
7. melakukan layanan pengguna (*customer service*);
8. melakukan pembinaan/sosialisasi/edukasi satuan kerja;
9. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran; dan
10. melakukan monitoring, bimbingan, dan konsultasi penyaluran Transfer ke Daerah.

Tujuh Prasyarat Pengarusutamaan Gender

1. Komitmen Pimpinan
2. Kebijakan yang Responsif Gender
3. Kelembagaan PUG Tim/Kelompok Kerja
4. Sumber Daya Manusia dan Anggaran
5. Data Terpilah
6. Alat Analisis Gender
7. Partisipasi Masyarakat

Prasyarat Implementasi PUG

a. Komitmen Pimpinan

Komitmen pimpinan selama periode tahun 2023 yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Wujud Komitmen Pimpinan dalam Bentuk Dokumen Resmi

- Kepala KPPN telah membentuk Tim Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Madiun Tahun 2023 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala KPPN Madiun Nomor KEP-1/KPN.1607/2023 tanggal 2 Januari 2023;
- Kepala KPPN telah menyusun Surat Keputusan Tim Media Sosial KPPN Madiun 2023 Nomor KEP-17/KPN.1607/2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Penunjukan Tim Pengelola Website Dan Media Sosial Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Madiun Tahun 2023. Adanya pembagian peran dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab secara merata kepada pegawai Perempuan dan pegawai laki-laki di dalam tim tersebut.

(Dokumen pendukung telah diunggah ke alamat <https://sipegiku.kemenkeu.go.id/#/prasyarat>)

Wujud Komitmen Pimpinan dalam Bentuk Kegiatan

- **Penandatanganan deklarasi/maklumat implementasi PUG:** KPPN Madiun secara terus menerus mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, ini ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama implementasi PUG Tahun 2023 oleh seluruh pegawai pada Kamis (22/02). Kegiatan ini diikuti oleh Kepala KPPN Madiun, Duta PUG KPPN Madiun, dan seluruh pegawai KPPN Madiun. Diharapkan seluruh pegawai senantiasa terus berpartisipasi aktif dalam mengimplementasikan PUG dan menyebarkan nilai-nilai strategi PUG

Dokumen pendukung telah diunggah ke alamat <https://sipegiku.kemenkeu.go.id/#/prasyarat>)

- **Kegiatan Lainnya:** Pada hari Rabu, 30 Agustus 2023 bertempat di ruang Aula KPPN Madiun, dilaksanakan penandatanganan piagam komitmen bersama pencegahan dan dukungan penanganan pelecehan seksual di lingkungan kerja KPPN Madiun, dalam rangka meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender. Penandatanganan ini dilakukan sesuai amanat Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 36/MK.2/2020 Seluruh pegawai KPPN Madiun senantiasa menjaga dan tidak memberi kesempatan terjadinya kekerasan/pelecehan seksual di lingkungan kerja.

(Dokumen pendukung telah diunggah ke alamat <https://sipegiku.kemenkeu.go.id/#/prasyarat>)

Prasyarat Implementasi PUG

b. Kebijakan yang Responsif Gender

Kebijakan Responsif Gender sesuai bidang tugas, fungsi, dan kewenangan

Adanya aturan mengenai pelaksanaan kegiatan PUG di Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan seperti:

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 807/KMK.01/2018 tentang Pedoman Implementasi PUG di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-116/PB/2017 Tentang Implementasi Pengarusutamaan Gender di Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

(Dokumen pendukung telah diunggah ke alamat <https://sipegiku.kemenkeu.go.id/#/prasyarat>)

Kebijakan penyediaan sarana dan prasarana-Sarana dan prasarana yang responsif gender:

Sarana dan Prasarana KPPN Madiun yang responsif gender telah dilengkapi:

- Ruang Laktasi Anak



Prasyarat Implementasi PUG

Kebijakan penyediaan sarana dan prasarana-Sarana dan prasarana yang responsif gender:

- Ruang Bermain Anak



Prasyarat Implementasi PUG

Kebijakan penyediaan sarana dan prasarana-Sarana dan prasarana yang responsif gender:

- Toilet terpisah laki-laki dan perempuan



Prasyarat Implementasi PUG

Kebijakan penyediaan sarana dan prasarana-Sarana dan prasarana yang responsif gender:

- Toilet terpisah laki-laki dan perempuan



Prasyarat Implementasi PUG

Kebijakan penyediaan sarana dan prasarana-Sarana dan prasarana yang responsif gender:

- Toilet bagi penyandang disabilitas



Prasyarat Implementasi PUG

Kebijakan penyediaan sarana dan prasarana-Sarana dan prasarana yang responsif gender:

- Ruang tunggu dan loket layanan prioritas



Prasyarat Implementasi PUG

Kebijakan penyediaan sarana dan prasarana-Sarana dan prasarana yang responsif gender:

- Parkir prioritas



Prasyarat Implementasi PUG

Kebijakan penyediaan sarana dan prasarana-Sarana dan prasarana yang responsif gender:

- Ram akses masuk bangunan/gedung bagi penyandang disabilitas



Prasyarat Implementasi PUG

c. Kelembagaan PUG Tim/Kelompok Kerja

Kelembagaan Pengarusutamaan Gender KPPN Madiun Tahun 2023 dan Rencana Program Kerja Tim Implementasi Pengarusutamaan Gender Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Madiun Tahun 2023 telah dibentuk dan disusun sesuai dengan Surat Keputusan Kepala KPPN Madiun Nomor KEP-1/KPN.1607/2023 tanggal 2 Januari 2023.

(Dokumen pendukung telah diunggah ke alamat <https://sipegiku.kemenkeu.go.id/#/prasyarat>)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 MADIUN

NOMOR KEP-1/KPN.1607/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) TAHUN 2023 PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MADIUN

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 MADIUN,

- Menimbang :
- bahwa sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-116/PB/2017 tanggal 27 Desember 2017 hal Implementasi Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan wajib mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender dalam segala aspek pelayanan kepada Mitra Kerja dan para Pegawai;
 - bahwa dalam rangka percepatan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Madiun membutuhkan lembaga koordinasi *ad hoc* berbentuk kelompok kerja (Pokja);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Madiun tentang Pembentukan Tim Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Madiun;
- Mengingat :
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 270/M.PPN/11/2012, Menteri Keuangan Nomor SE-33/MK.02/2012, Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4379A/SJ, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor SE-46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG)
 - Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-116/PB/2017 tentang Implementasi Pengarusutamaan Gender di Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MADIUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) TAHUN 2023 PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MADIUN.

Prasyarat Implementasi PUG

- 2 -

- KESATU : Menetapkan pejabat/pegawai yang nama dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Madiun.
- KEDUA : Tim Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Madiun, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi dalam rangka peningkatan kapasitas pemahaman pengarusutamaan gender/internalisasi kepada seluruh pejabat/pegawai;
 2. Melakukan evaluasi kebijakan menggunakan alat analisis PUG dalam kaitannya dengan pengarusutamaan gender;
 3. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, memberikan masukan atas kebijakan yang dihasilkan kepada pembuat kebijakan;
 4. Memfasilitasi materi/bahan/narasumber dalam rangka sosialisasi PUG sesuai tugas dan fungsi unit;
 5. Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur selaku koordinator Pengarusutamaan Gender lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur;
 6. Tugas terkait PUG lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- KETIGA : Tim Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Madiun bertanggungjawab kepada Tim Pengarusutamaan Gender (PUG) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Madiun ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Madiun ini disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA KANTOR



Ditandatangani secara elektronik
JOKO MARYONO

Prasyarat Implementasi PUG

Lampiran I

Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Madiun Nomor: KEP-1/WPB.16/KP.07/2023 tanggal 2 Januari 2023 Tentang Pembentukan Tim Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Madiun

SUSUNAN TIM IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MADIUN

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Kedudukan
1	Joko Maryono NIP 196909171998031002	Pembina Tk I/ (IV/b)	Pembina
2	Windi Meiliana NIP 197505141996032001	Penata Tk. I (III/d)	Koordinator
3	Affandi Pattangai NIP 198304162003121002	Penata Muda (III/)	Ketua/Duta PUG (Seksi Promosi dan Duta)
4	Agustina Rahayuningtyas NIP 198928282010122001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Koordinator Seksi Evaluasi Kebijakan
5	Hudiyah Inayati NIP 197605021996022002	Penata (III/c)	Koordinator Seksi Pelaksanaan Kebijakan
7	Yuli Rohmawati NIP 198207172001122001	Penata (III/c)	Koordinator Seksi Monitoring Capaian Tim, Evaluasi dan Pelaporan
9	Sigit Hari Wibowo NIP 196505151985031002	Penata Muda Tk I (III/b)	Koordinator Seksi Humas, dan Sebar Luas
10	Andika Rachmandiansyah NIP 198310312004121002	Pengatur Tk I (II/d)	Anggota Seksi Humas, dan Sebar Luas

KEPALA KANTOR,



Ditandatangani secara elektronik
JOKO MARYONO

Prasyarat Implementasi PUG

Lampiran II

Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Madiun Nomor: KEP-1/WPB.16/KP.07/2023 tanggal 2 Januari 2023 Tentang Tentang Pembentukan Tim Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Madiun

RENCANA PROGRAM KERJA TIM IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MADIUN TAHUN 2023

No.	Nama Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1.	Sharing Session Implementasi PUG	Sharing Session berupa kegiatan Gugus Kendali Mutu (GKM) terkait pemahaman Implementasi PUG dan Data Terpilah Tahun 2023 dipandu oleh Koordinator dan Duta PUG KPPN Madiun	Februari 2023
2.	Rapat Tim PUG	Rapat Program Kerja dan Kesamaan Pemahaman bersama Tim PUG terkait Implementasi PUG	Bulan Februari 2023
3.	Edukasi PUG	Edukasi terkait PUG kepada stakeholder	Bulan Maret 2023
4.	Sosialisasi Implementasi PUG Eksternal	Kerjasama terkait implementasi PUG dengan antar unit eselon I Kementerian Keuangan yang ada di Kota Madiun	Bulan Oktober 2023

Mengetahui/Menyetujui
Kepala Kantor,

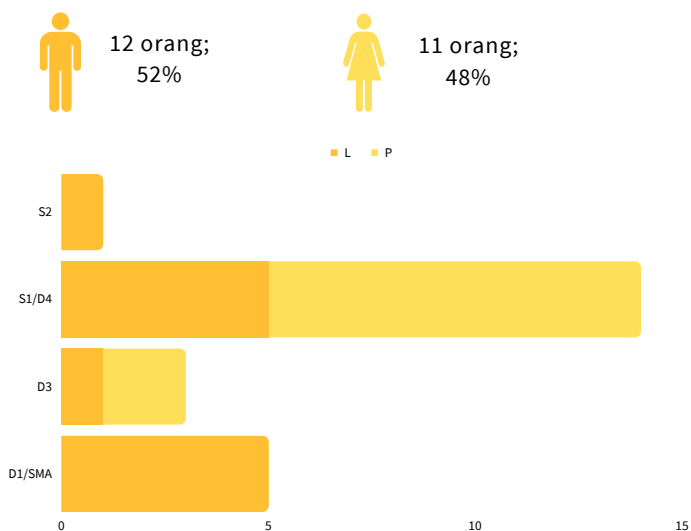


Ditandatangani secara elektronik
JOKO MARYONO

Prasyarat Implementasi PUG

d. Sumber Daya Manusia dan Anggaran

Untuk menjalankan tugas dan fungsi, KPPN Madiun didukung oleh 23 pegawai yang terdiri atas 1 pejabat administrator (Kepala Kantor), 5 pejabat pengawas, 4 pejabat fungsional (1 fungsional Pranata Keuangan APBN dan 3 fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara), dan 13 pelaksana umum. Berdasarkan generasinya, sebanyak 16 pegawai (70 persen) adalah Generasi X (kelahiran 1965-1979) dan 7 pegawai (30 persen) adalah Generasi Y (kelahiran 1980-1994).



Grafis Statistik Pegawai KPPN Madiun Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan Terakhir
Sumber data: PBN Open, status data tanggal 30 September 2023

Alokasi dana DIPA KPPN Madiun TA 2023 yang dibutuhkan pada *Output* Layanan Perkantoran sebesar Rp65.661.000,- dengan rincian Rp23.750.000,- untuk keperluan rehab kamar mandi tamu di bagian pos satpam dan Rp41.911.000,- untuk keperluan rehab kamar mandi pegawai.

Kertas Kerja

Tampilkan : ☐ Satker (1) ☐ KRO (1) ☐ RO (1) ☐ Komponen (1) ☐ Akun (1) ☒ Detail (3) [Export ke Excel](#)

523111

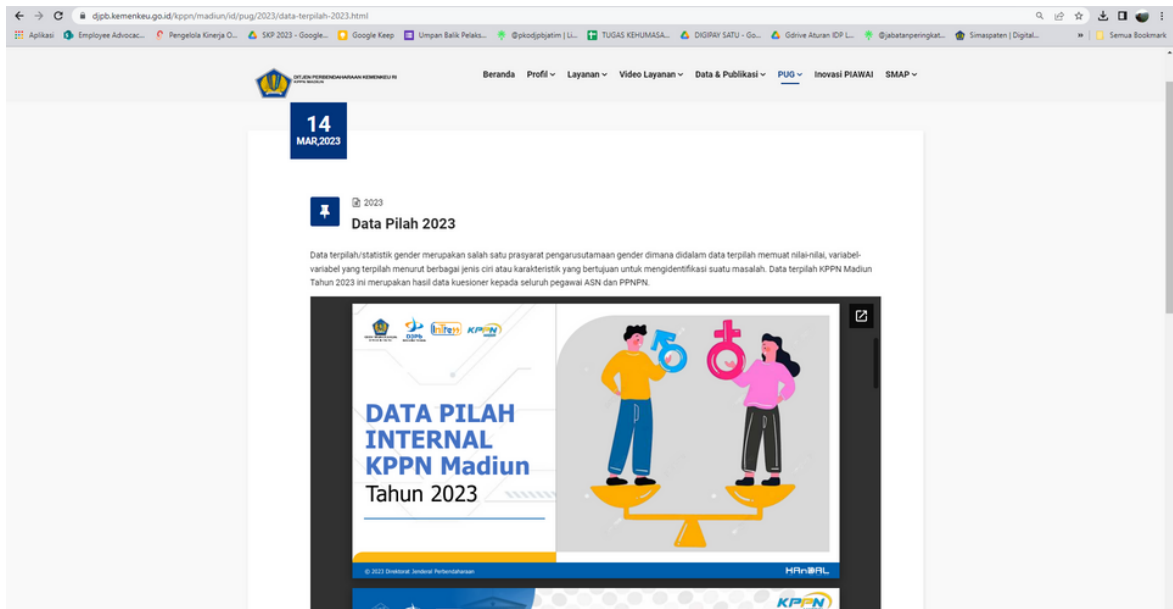
Kode	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah
527450	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MADIUN			2.156.531.000
015.08.WA	Program Dukungan Manajemen			1.976.567.000
4715	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum			1.576.293.000
4715.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Base Line) Lokasi : JAWA TIMUR	36 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		1.565.869.000
4715.EBA.994	Layanan Perkantoran	12 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		1.479.221.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1.479.221.000
E	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			386.209.000
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			363.819.000
	- Pemeliharaan Gedung Kantor Bertingkat	161,00 M2	147.000	23.667.000
	- Pemeliharaan Gedung Kantor Tidak Bertingkat	2.466,00 M2	127.500	314.670.000
	- Pemeliharaan Halaman Kantor	3.371,00 M2	7.500	25.282.000

Data SDM dan Anggaran Responsif Gender KPPN Madiun telah direkam pada alamat <https://sipegiku.kemenkeu.go.id/#/prasyarat>

Prasyarat Implementasi PUG

e. Data Terpilah

KPPN Madiun telah menyusun data terpilah internal pada tahun 2023 dan telah unggah pada website KPPN madiun pada alamat <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/madiun/id/pug/2023/data-terpilah-2023.html>



Kepala Subbagian Umum dan Duta PUG KPPN Madiun telah mengikuti kegiatan *E-Learning* Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Tahun 2023 dari tanggal 4 s.d. 10 Oktober 2023 secara daring melalui Kemenkeu *Learning Center* (KLC2) sesuai Surat Tugas Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Nomor ST-546/WPB.16/2023 tanggal 20 September 2023.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAWA TIMUR
 GEDUNG KEUANGAN NEGARA I, JALAN INDRAPURA NO. 5, SURABAYA 60175, TELEPON (031) 3523765, 3525229,
 FAKSIMILE (031) 3558640, 3566201; SUREL kanwil.djpb.jatim@gmail.com; LAMAN
www.djp.kemenkeu.go.id/kanwil/jatim

SURAT TUGAS NOMOR ST-546/WPB.16/2023

Sehubungan dengan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor ND-3032/PB.1/2023 hal Pemanggilan Peserta Pelatihan E-Learning Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Tahun 2023 dengan ini kami menugaskan pegawai berikut (terlampir) untuk mengikuti E-learning Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Batch 3 yang diadakan secara daring melalui Kemenkeu Learning Center pada Tanggal 4 s.d. 10 Oktober 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta melakukan registrasi secara online dengan cara mengakses alamat: <https://semantik.bppk.kemenkeu.go.id/mobile/> (username dan password: akun Kemenkeu ID). Panduan dapat dilihat di laman KLC atau pada tautan bit.ly/TutorialSemantik2023.
2. Peserta yang telah diterbitkan surat tugasnya wajib mengikuti rangkaian pelaksanaan pelatihan sampai dengan selesai,
3. Selama pelaksanaan pelatihan, peserta agar dibebastugaskan dari pekerjaan sehari-hari.
4. Selama proses pembelajaran, Pusdiklat AP akan membuat Community of Practice (CoP) dalam bentuk Whatsapp Group. Dalam CoP ini, terdapat admin yang bertugas untuk memandu dan membantu permasalahan yang dihadapi peserta dalam proses pelaksanaan E-Learning.

Surat Tugas ini disusun untuk dilaksanakan dan setelah selesai dilaksanakan, pelaksana segera menyampaikan laporan. Kepada instansi terkait, kami mohon bantuan demi kelancaran pelaksanaan tugas tersebut.

Surabaya, 20 September 2023
 Kepala Kantor Wilayah Direktorat
 Jenderal Perbendaharaan Provinsi
 Jawa Timur



Ditandatangani secara elektronik
 Taufhid

Prasyarat Implementasi PUG

e. Data Terpilah

2

Lampiran Surat Tugas Kepala
Kanwil DJPb Prov. Jawa Timur
Nomor : ST-546/WPB.16/2023
Tanggal : 20 September 2023

DAFTAR PESERTA E-LEARNING PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER TAHUN 2023 (4 s.d. 10 Oktober 2023)

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol.	Jabatan	Unit Kerja
1.	Belly Profilyanti / 199302282018012001	Penata Muda Tk. I / III.b	Pelaksana Bagian Umum	Kanwil DJPb Prov. Jawa Timur
2.	Irawan Lutfi Ali / 198501172004121002	Penata Muda / III.a	Pelaksana Bidang SKKI	Kanwil DJPb Prov. Jawa Timur
3.	Siti Fatimah / 197404281994032001	Penata Tk. I / III.d	Pelaksana Bidang PPA I	Kanwil DJPb Prov. Jawa Timur
4.	Taufik Adi Nugroho / 198601212006021004	Penata Muda / III.a	Pelaksana Bidang PPA II	Kanwil DJPb Prov. Jawa Timur
5.	Endang Sumiati / 198403252004122001	Penata Muda / III.a	Pelaksana Seksi Bank	KPPN Surabaya I
6.	Rafika Norma Fattahila / 199511292018012002	Pengatur Tk. I / II.d	Pelaksana Seksi Pencairan Dana	KPPN Surabaya I
7.	Pujo Priyatno / 197504141994021001	Penata Tk. I / III.d	Kepala Subbagian Umum	KPPN Surabaya II
8.	Addin Cahya Putri / 199509102018012001	Penata Tk. I / II.d	Pelaksana Seksi Verifikasi dan Akuntansi	KPPN Surabaya II
9.	Sudarno / 197401061996021001	Penata Tk. I / III.d	Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi	KPPN Sidoarjo
10.	Ayuni Rakhmawati / 198206032002122001	Penata / III.c	Pelaksana Seksi Pencairan Dana	KPPN Sidoarjo
11.	Irfani Rosyidah Rahmah / 199904272018122002	Pengatur Muda / II.b	Pelaksana Seksi Verifikasi dan Akuntansi	KPPN Malang
12.	Rosy Dwityan Nurshanty / 199101072014112001	Penata Muda / III.a	Pelaksana Seksi Pencairan Dana	KPPN Malang
13.	In Setyo Utomo / 197504191996021001	Pembina / IV.a	Kepala Subbagian Umum	KPPN Pamekasan
14.	Chairul Anwar / 196907121989121001	Penata Tk. I / III.d	Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi	KPPN Pamekasan
15.	Ernawati / 197205121994022001	Pembina / IV.a	Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi	KPPN Bondowoso
16.	Maulidina Rahmawati / 199906282018122001	Pengatur Muda / II.b	Pelaksana Seksi Bank	KPPN Bondowoso
17.	Fijri Rahmawati / 197101061997032001	Pembina / IV.a	Kepala Subbagian Umum	KPPN Madiun
18.	Affandi Pattangai / 198304162003121002	Penata Muda Tk. I / III.b	Pelaksana Subbagian Umum	KPPN Madiun
19.	Kasman / 197107291994031001	Penata Tk. I / III.d	Kepala Subbagian Umum	KPPN Kediri

Duta PUG KPPN Madiun telah menyampaikan penjelasan data terpilah KPPN Madiun tahun 2023 kepada seluruh pegawai KPPN Madiun kepada seluruh pegawai pada kegiatan Gugus Kendali Mutu padan tanggal 15 Maret 2023 sesuai Nota Dinas Kepala KPPN Madiun Nomor ND-161/KPN.1607/2023 tanggal 28 Februari 2023

Prasyarat Implementasi PUG

e. Data Terpilah

Duta PUG KPPN Madiun telah menyampaikan penjelasan data terpilah KPPN Madiun tahun 2023 kepada seluruh pegawai KPPN Madiun kepada seluruh pegawai pada kegiatan Gugus Kendali Mutu pada tanggal 15 Maret 2023 sesuai Nota Dinas Kepala KPPN Madiun Nomor ND-161/KPN.1607/2023 tanggal 28 Februari 2023.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 MADIUN
JALAN SALAKA 52, MADIUN 61131, TELEFON (0351) 45046, 45047, FAKSIMILE (0351) 459183,
SUREL: kppnmadiun@kemkeu.go.id, LAMAR: www.djpa.kemkeu.go.id/kppnmadiun

NOTA DINAS
NOMOR ND-161/KPN.1607/2023

Yth. : Para Pegawai KPPN Madiun
Dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Madiun
Sifat : Biasa
Hal : Kegiatan Gugus Kendali Mutu/ Sharing Session bulan Maret 2023.
Tanggal : 28 Februari 2023

Dalam rangka peningkatan pemahaman pegawai terhadap peraturan baru terkait pelaksanaan tugas dan guna meningkatkan pelayanan kepada stakeholder, dengan ini diperintahkan kepada para pejabat dan pegawai KPPN Madiun untuk mengikuti kegiatan Gugus Kendali Mutu/ Sharing Session melalui daring dan dilanjutkan pemaparan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) beserta Indikator Kinerja Individu (IKI) Utama yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Sesuai jadwal terlampir
Meeting Zoom : 403 106 2134 (password: kppnmadiun)
Waktu : 15.30 WIB s.d selesai
Materi : Sesuai jadwal terlampir

Demikian penyampaian Nota Dinas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pth. Kepala Kantor



Dilandatangani secara elektronik
Fiji Rahmawati

"Bersama Anda Membangun Ekonomi Dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Jawa Timur"



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 MADIUN
JALAN SALAKA 52, MADIUN 61131, TELEFON (0351) 45046, 45047, FAKSIMILE (0351) 459183,
SUREL: kppnmadiun@kemkeu.go.id, LAMAR: www.djpa.kemkeu.go.id/kppnmadiun

NOTULA

KEGIATAN GUGUS KENDALI MUTU (GKM) DATA PILAH INTERNAL PUG KPPN MADIUN TAHUN 2023 DAN PEMAPARAN IKI UTAMA PELAKSANA 2023

A. Dasar
Nota Dinas Kepala KPPN Madiun Nomor ND-161/KPN.1607/2023 tanggal 28 Januari 2023 tentang Kegiatan Gugus Kendali Mutu/ Sharing Session bulan Maret 2023.

B. Waktu dan Tempat
Kegiatan GKM dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 pukul 15.45 s.d. 17.00 WIB melalui daring Aplikasi Zoom.

C. Agenda
Penyampaian hasil data terpilah kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG) KPPN Madiun Tahun 2023 dan pemaparan Indikator Kinerja Individu (IKI) Utama Tahun 2023.

D. Peserta

No.	Nama	Unit Organisasi
1.	Kepala KPPN Madiun	KPPN Madiun
2.	Para Pejabat Pengawas	KPPN Madiun
3.	Para Pejabat Fungsional	KPPN Madiun
4.	Para Pelaksana	KPPN Madiun

E. Pelaksanaan Rapat

I. Pembukaan

Kegiatan GKM dibuka oleh Kepala Subbagian Umum, Ibu Fiji Rahmawati. Beberapa hal yang disampaikan antara lain, kegiatan GKM pada hari ini (15/03) dengan narasumber Duta PUG KPPN Madiun, Affandi Pattangal, pembahasan materi GKM yaitu tentang data terpilah PUG KPPN Madiun Tahun 2023 dan pemaparan Indikator Kinerja Individu (IKI) Utama oleh setiap pelaksana KPPN Madiun sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2023. Pemaparan IKI Utama ini selain membahas manual IKI Utama juga membahas inisiatif strategis di dalam pencapaian target IKI Utama.

II. Pembahasan

- Sesuai dengan nota Dinas Kepala KPPN Madiun nomor ND-121/KPN.1607/2023 tentang Pengisian Data Terpilah Pengarusutamaan Gender (PUG) KPPN Madiun Tahun 2023 tanggal 10 Februari 2023, Duta PUG KPPN Madiun telah menyebar kuesioner kepada seluruh pegawai dan tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) KPPN Madiun s.d. tanggal 17 Februari 2023.
- Berdasarkan data isian data terpilah tersebut, Duta PUG KPPN Madiun telah menyusun data terpilah internal KPPN Madiun tahun 2023 dengan jumlah responden 40 orang.
- Data terpilah internal tersebut diklasifikasikan ke dalam:
 - Data pilah menurut jenis kelamin dan pekerjaan;
 - Data pilah menurut karakteristik usia;

c. Data

2

Lampiran Nota Dinas Kepala KPPN Madiun
Nomor : ND-161/KPN.1607/2023
28 Februari 2023]

JADWAL PELAKSANAAN GUGUS KENDALI MUTU/SHARING SESSION BULAN MARET 2023

No.	Hari / Tanggal	Materi	Pemateri
1.	Rabu, 1 Maret 2023	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Penerbitan SKPP secara Elektronik	Seksi Pencairan Dana Andika Rachmandiansyah (Notulensi Seksi terkait)
2.	Rabu, 8 Maret 2023	Pengelolaan Rekening Kementerian/Lembaga	Kepala Seksi Bank (Notulensi Seksi terkait)
3.	Rabu 15 Rabu 2023	Penyampaian Data Terpilah PUG KPPN Madiun	Subbag Umum Affandi Pattangal (Notulensi Seksi terkait)
4.	Rabu 29 Maret 2023	Refreshment APK	Seksi Vera (Notulensi Seksi terkait)

Catatan :
Untuk Rabu tanggal 29 Maret 2023 menyesuaikan dengan jadwal bulan puasa.

2

- Data pilah menurut jenjang pendidikan;
 - Data pilah menurut jarak tempuh (rumah ke kantor);
 - Data pilah menurut moda transportasi;
 - Data pilah menurut kondisi kesehatan;
 - Data pilah menurut lokasi jam istirahat;
 - Data pilah menurut tinggal dengan orang tua;
 - Data pilah opini dan usulan internal terdiri dari data pilah kenyamanan sarana dan prasarana, usul pegawai terkait sara dan prasarana, usul pegawai terkait kesehatan, dan usul pegawai terkait pelatihan sebelum pensiun.
4. Duta PUG KPPN Madiun juga menyampaikan kembali makna logo PUG DJPb dan SE-116/PB/2017 tentang Pedoman Implementasi PUG DJPb kepada seluruh pegawai KPPN Madiun.
5. Setelah penyampaian materi tentang PUG, dilanjutkan dengan pemaparan IKI Utama pelaksana di Subbagian Umum berdasarkan SKP dan manual IKI Utama tahun 2023 sebagai bagian dari transfer knowledge ke pegawai lainnya.
6. Diingatkan kembali, agar setiap pegawai wajib memaparkan IKI Utama yang diampunya berdasarkan SKP dan manual IKI Utama tahun 2023 dan akan rutin dilaksanakan setelah kegiatan GKM selesai.

III. Simpulan

- Kesimpulan kegiatan GKM dan pemaparan IKI Utama pegawai tahun 2023 adalah:
- Kegiatan pengumpulan data terpilah internal PUG KPPN Madiun tahun 2023 merupakan bagian dari kegiatan Duta PUG KPPN Madiun pada tahun 2023;
 - Data terpilah yang telah diolah akan menjadi dasar di dalam penyusunan analisis gender dalam penyusunan penganggaran yang responsif gender (PRRG) yang ditunjukkan dalam Gender Budget Statement (GBS);
 - Setiap pegawai wajib memaparkan IKI Utama yang diampunya berdasarkan SKP dan manual IKI Utama tahun 2023.

Mengetahui,
Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Tipe A1 Madiun



Dilandatangani secara elektronik
Joko Maryono

Dibuat di Madiun,
Pada tanggal 20 Maret 2023

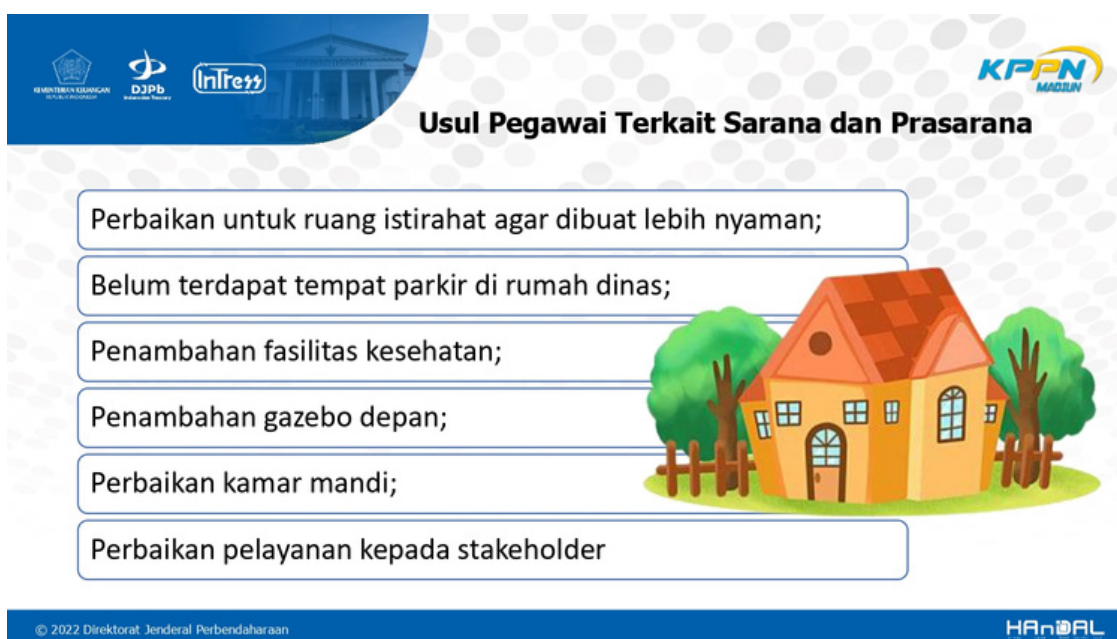
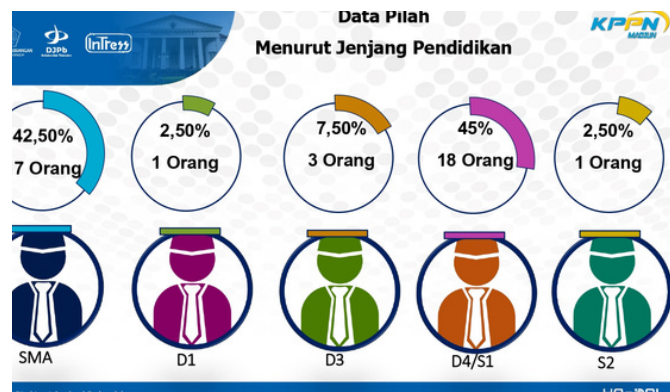
Notulis



Dilandatangani secara elektronik
Affandi Pattangal

Prasyarat Implementasi PUG

e. Data Terpilah



"Kesetaraan gender harus dapat memberikan manfaat yang besar dan penting dari sisi ekonomi dan kualitas masyarakat"

- Sri Mulyani Indrawati

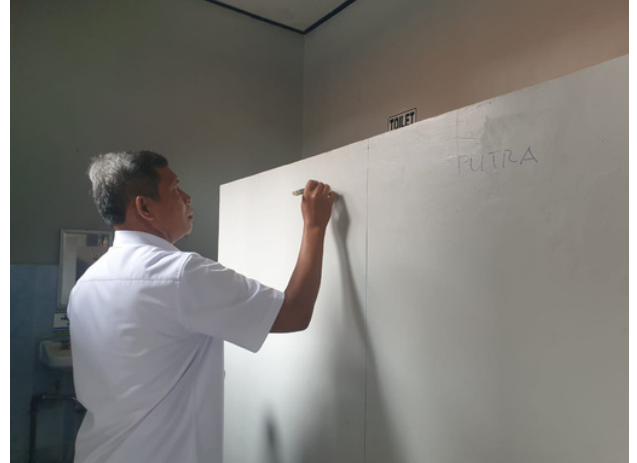


Prasyarat Implementasi PUG

e. Alat Analisis Gender

KPPN Madiun telah menyusun analisi gender tahun 2023 dengan total anggaran responsif gender (ARG) sebesar Rp65.661.000 untuk pemeliharaan kamar mandi laki-laki dan perempuan untuk tamu dan pegawai KPPN Madiun

Sebelum pemeliharaan:



Sesudah pemeliharaan:



Prasyarat Implementasi PUG

e. Partisipasi Masyarakat

Kepala KPPN Madiun, Duta PUG KPPN Madiun dan tim *Treasury Goes To School* KPPN Madiun berkesempatan untuk berkunjung dan menyapa para pelajar di SMK Negeri 2 Kota Madiun pada hari Jumat, 1 September 2023. Mengusung tema APBN yaitu "Muda Berintegritas, Pahami APBN Membangun Negeri", para pelajar selain memperoleh materi terkait APBN dan pengarusutamaan gender, *island of integrity*, juga mendapat informasi terkait informasi pembangunan yang dibiayai dari APBN. Dengan prinsip No One Left Behind, sesuai dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) diharapkan para pelajar dapat mengetahui manfaat APBN untuk perlindungan sosial, pendidikan, dan penghidupan yang layak.



Kesimpulan dan Rencana Kedepan

a. Kesimpulan

KPPN Madiun menempati gedung yang terletak di Jalan Salak Nomor 52, Taman Kota Madiun dengan sarana dan prasarana yang didesain ramah terhadap Pengarusutamaan Gender dan Laki-Laki Ramah Perempuan Berkarir. KPPN Madiun juga telah mengimplementasikan PUG dalam hal pelayanan kepada mitra kerja dan pelayanan internal.

b. Rencana Kedepan

Untuk tahun 2024, rencana kegiatan PUG di KPPN Madiun diantara peningkatan sarpras yang ada saat ini, sinergi dengan instansi vertikal Kementerian Keuangan yang ada di Kota Madiun terkait implementasi PUG dan penyusunan data terpilah/statistik gender.

LAMPIRAN

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
KELUARAN (OUTPUT) TA 2023

Kementerian/Lembaga	:	Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Unit Eselon I/II	:	Direktorat Jenderal Perbendaharaan/Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur
Program	:	Program Dukungan Manajemen
Sasaran Program	:	-
Indikator Kinerja Program	:	-
Kegiatan	:	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum
Sasaran Kegiatan	:	-
Indikator Kinerja Kegiatan	:	-
Klasifikasi Rincian Output	:	Layanan Dukungan Manajemen Internal
Indikator KRO (optional)	:	-
Rincian Output	:	Layanan Perkantoran
Indikator RO	:	-
Volume RO	:	12
Satuan RO	:	Layanan

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun fungsinya antara lain: a. pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan; b. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN); c. penyaluran pembiayaan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan pelaksanaan fasilitasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah.

2. Gambaran Umum

Analisis Situasi Ketimpangan Gender

Saat ini kondisi kamar mandi untuk pegawai dan mitra kerja KPPN Madiun telah terpisah, tetapi akses untuk jalan masuk ke pintu kamar mandi tersebut masih menyatu, sehingga perlu untuk dilakukan penataan akses jalan pintu masuk-keluar kamar mandi laki-laki dan perempuan tersebut.

Rencana Aksi dari Gender Action Budget

- Memeriksa kondisi kamar mandi;
- Membuat rencana pemeliharaan kamar mandi tersebut;
- Kepala kantor bersama dengan pejabat pengadaan, pejabat pembuat komitmen, dan Duta Pengarusutamaan Gender berdiskusi mengenai rencana rehab kamar mandi pegawai dan kamar mandi mitra kerja KPPN Madiun.
- Membuat perhitungan atas pekerjaan kamar mandi tersebut

Hasil Yang Diharapkan

Kamar mandi pegawai dan kamar mandi mitra kerja KPPN Madiun dapat berfungsi dengan baik dan akses jalan masuk-keluar kamar mandi tersebut terpisah antara laki-laki dan perempuan

B. Penerima Manfaat

Para pegawai dan mitra kerja KPPN Madiun

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan untuk pemeliharaan kamar mandi tersebut yaitu dengan pengadaan langsung.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan selama bulan Maret 2023.

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Kegiatan	Maret Minggu I	Maret Minggu II	Maret Minggu III	Maret Minggu IV
Pembongkaran kamar mandi pegawai Laki-laki dan Perempuan	v			
Pekerjaan pembuatan dinding pemisah pembuatan pondasi jalan ke kamar mandi		v		
Penggantian kloset dan penambahan tempat cuci tangan			v	
Pengecatan			v	
Pembersihan material				v

E. Biaya Yang Diperlukan

Pekerjaan pemeliharaan kamar mandi untuk para pegawai dan para mitra kerja diperkirakan akan memerlukan biaya sebesar Rp65.661.000.

Penanggung Jawab Kegiatan,
Kuasa Pengguna Anggaran
KPPN Madiun



Ditandatangani secara elektronik
Joko Maryono
NIP 196909171998031002





KPPN Madiun
Jalan Salak Nomor 52 Madiun
Telepon (0351) 454545
kppnmadiun@kemenkeu.go.id
<https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/madiun/id/>